

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATYOSO

Alamat : Jln. Raya Jatipuro – Jatiyoso, Telp. (0271) 495039 ext. 320, Fax. (0273) 3201320
Website : jatiyoso.karanganyarkab.go.id, E-mail : jatiyoso@karanganyarkab.go.id
Kode Pos 57785

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Jatiyoso Tahun 2024.

Selaku Organisasi Perangkat Daerah yang berada di wilayah, kami berupaya dapat melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang diamanatkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 serta tugas-tugas lainnya yang diserahkan kepada kami selaku Camat. Adapun berbagai kegiatan selama Tahun 2024 yang telah kami laksanakan tergambar pada buku laporan ini, baik keberhasilan maupun kendala yang kami hadapi.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Jatiyoso ini, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap Pegawai Kantor Kecamatan Jatiyoso dan pihak-pihak yang telah membantu penyusunannya. Kami menyadari terdapat banyak kekurangan baik pada isi maupun tata bahasa penyusunan kalimat, untuk itu kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan semoga Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Jatiyoso ini bermanfaat sehingga lebih meningkatkan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Jatiyoso.

Jatiyoso, Januari 2025

CAMAT JATIYOSO

HARYANTO, S.E., M.A.P.
Pembina
NIP. 19670514 198903 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	3
BAB II DISKRIPSI OPD	4
A. Tugas Pokok dan Fungsi	4
B. Jumlah Program Nasional Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Jatiyoso	5
C. Standard Operating Procedure (SOP) Kacamatan Jatiyoso	5
D. Perda/Perbup Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	5
E. Organisasi	6
F. Kepegawaian	8
BAB III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	11
BAB IV HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	12
BAB V CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	25
BAB VI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	26
BAB VII INOVASI DAN PENGHARGAAN	27
BAB VIII PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2028-2023 sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati di Tahun 2023.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, mengamanatkan agar Bupati memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Kecamatan Jatiyoso telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasikan pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Jatiyoso tersebut ditindaklanjuti dalam penyusunan kegiatan setiap tahun yaitu berupa dokumen Rencana Kerja. Hal ini dalam rangka mewujudkan kinerja aparatur pemerintahan dan kelembagaan Kecamatan Jatiyoso yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel dan berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Transparansi adalah keterbukaan akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan suatu organisasi

kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Termasuk juga pertanggungjawaban terhadap kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan kepada Camat.

Pemerintah Kecamatan Jatiyoso adalah bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar, untuk itu berdasarkan Perda Kabupaten Karanganyar No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jatiyoso adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati Karanganyar.

B. Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Camat ini adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah.
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 162);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68

Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2024;

8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Perbub No 16 Tahun 2023 tentang rencana strategis Perangkat daerah Tahun 2024-2026.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Tahunan ini adalah harapan untuk mencapai Program/kegiatan Kecamatan Jatiyoso yang dilaksanakan dan tanggungjawab OPD atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan LPT merupakan pencapaian program dan kegiatan Kecamatan Jatiyoso yang di dasarkan pada Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024. LPT bertujuan menginformasikan pencapaian indikator tahunan Kecamatan Jatiyoso yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaranh serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan capaian program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

DESKRIPSI OPD

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, pada Bab III Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- f. Membina dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa dan Kelurahan.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Umum, Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pemerintahan, pembinaan dan fasilitasi pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;

- c. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

B. Jumlah Program Nasional Yang di laksanakan Oleh Kecamatan Jatiyoso : Tidak Ada

C. Standard Operating Procedure (SOP) Kecamatan Jatiyoso

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan bagi Kecamatan Jatiyoso untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan sebagai alat penilaian kinerja berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja dan prosedur. SOP yang telah dibuat antara lain :

1. SOP Prosedur Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar
2. SOP Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu
3. SOP Prosedur Administrasi Pengajuan KTP
4. SOP Pelayanan Legalisasi/Rekomendasi Pengantar Ijin Keramaian
5. SOP Prosedur Layanan Legalisasi Surat-surat dan Rekomendasi Surat-surat
6. SOP Surat Ijin Penelitian
7. SOP Penyusunan Rencana Kerja
8. SOP Penyusunan SPJ Keuangan
9. SOP Penyusunan RKA dan DPA
10. SOP Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
11. SOP Penerbitan DP3 PNS
12. SOP Penerbitan DP3 Eselon IV (Kasi)
13. SOP Permohonan Penerbitan Kartu Kepegawaian
14. SOP Permohonan Penerbitan Dokumen Kepegawaian (Pengajuan Pensiun, Kenaikan Pangkat, dll)

D. Perda/Perbub yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan

Dasar pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jatiyoso adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 162);

2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024;
 4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024;
 5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2024;
 6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024;
 7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Perbub No 16 Tahun 2023 tentang rencana strategis Perangkat daerah Tahun 2024-2026.

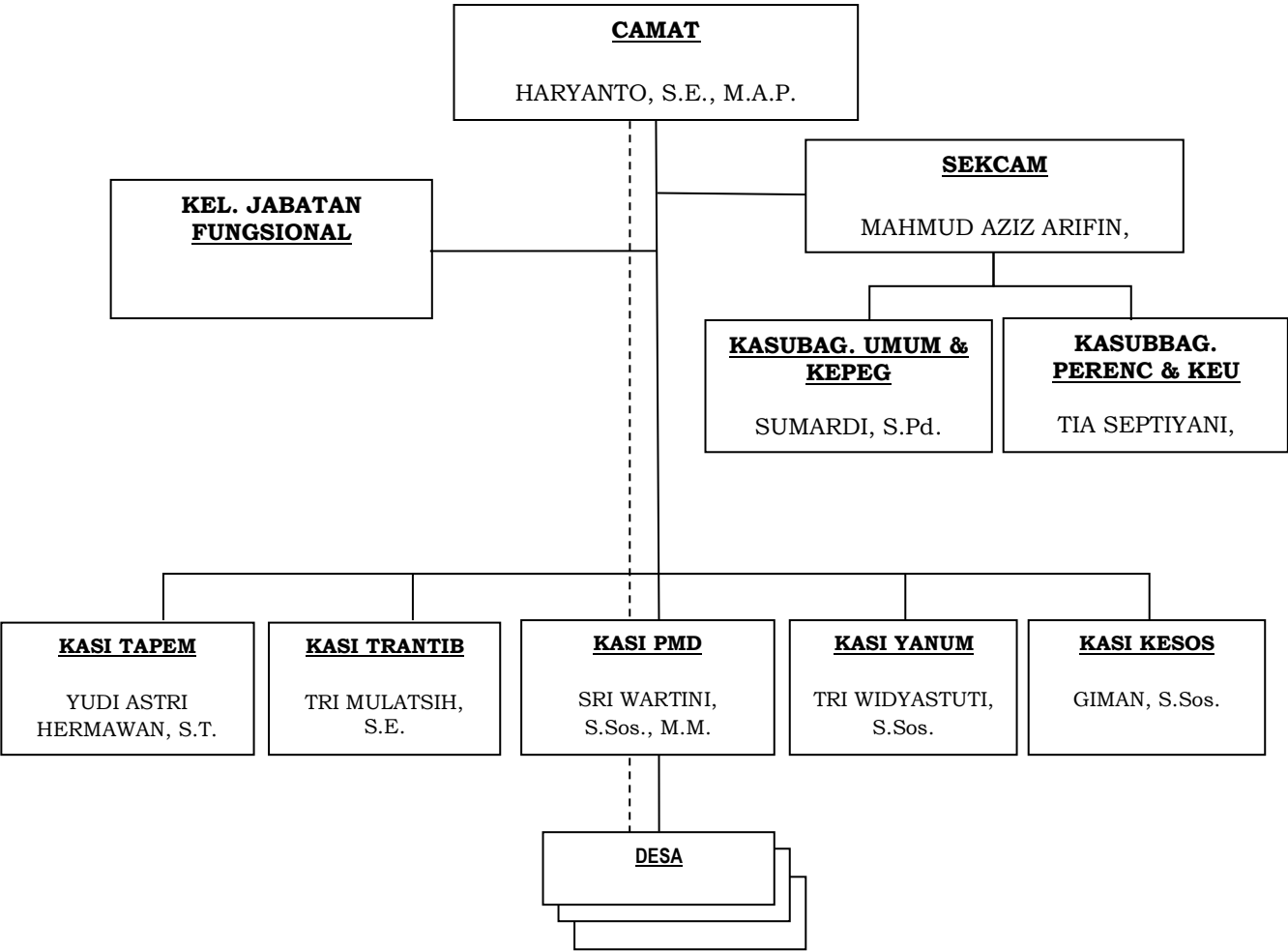
E. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar, Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur organisasi Kecamatan Jatiyoso sebagai berikut:



Ket : ___ Garis Komando
---- Garis Koordinasi

F. KEPEGAWAIAN

Berdasarkan data Kepegawaian di Kecamatan Jatiyoso dapat kami deskripsikan sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Kecamatan Jatiyoso Keseluruhan :

NO	NAMA	NIP	STATUS CPNS/ PNS	PANGKAT / GOL
1	HARYANTO, S.E., M.A.P.	196705141998031011	PNS	Pembina (IV/a)
2	MAHMUD AZIZ ARIFIN, S.K.M., M.M.	197312101998031008	PNS	Penata Tk.I (III/d)
3	YUDI ASTRI HERMAWAN, S.T.	198308312009021005	PNS	Penata Tk.I (III/d)
4	GIMAN, S.Sos.	197009091989031001	PNS	Penata Tk.I (III/d)
5	TRI WIDYASTUTI, S.Sos.	196709241993032006	PNS	Penata Tk.I (III/d)
6	SRI WARTINI, S.Sos., M.M.	197607281998032002	PNS	Penata Tk.I (III/d)
7	TRI MULATSIH, S.E.	197909212011012008	PNS	Penata Muda Tk. I (III/b)
8	TIA SEPTIYANI, A.Md.	198609192010012025	PNS	Penata Muda Tk. I (III/b)
9	SUNARDI	197401042008011004	PNS	Pengatur Tk I (II/d)
10	SRIYATNO	197001082009061001	PNS	Pengatur Tk I (II/d)
11	MURTOYO	198611032012121002	PNS	Pengatur Muda Tk.I (II/b)
12	AGUNG HARIMURTI WIDODO, S.Kom.			
13	SRI MURTINI		THL	
14	WAHYU WIDHI HASTONO		THL	
15	WAHYU RIYA MAHENDRA, A.Ma.Pust		THL	
16	FEBRI PUGUH RAMADAN		THL	
17	WIBOWO PAMUNGKAS		THL	
18	SUTOPO ANDI PURNOMO, S.E.		THL	
19	MUCHSIN ALHUDA		THL	
20	JOKO SUSILO		THL	
21	TRI WAHYU MUGI RAHARJO		THL	

22	WISNU JOKO PURNOMO		THL	
23	AULIA AYU ATIKA PUTRI		THL	
24	AGUS PURWANTO		THL	
25	NITA SURYANINGSIH		THL	
26	HERI SETIAWAN		THL	
27	RIDWAN ALFIN FAUZI		THL	
28	EDI PURWANTO		THL	
29	WAGINO		THL	

2. Jumlah Pegawai Struktural SKPD Yang Terisi :

NO	NAMA	Jabatan Struktural	Memenuhi Persyaratan DIKLATPIM	Memenuhi syarat Kepangkatan
1	HARYANTO, S.E., M.A.P.	Camat	V	V
2	MAHMUD AZIZ ARIFIN, S.K.M., M.M.	Sekcam	V	V
3	YUDI ASTRI HERMAWAN, S.T.	Kasi Tapem	V	V
4	SRI WARTINI, S.Sos., M.M.	Kasi PMD	V	V
5	TRI MULATSIH, S.E.	Kasi Trantib	V	V
6	GIMAN, S.Sos.	Kasi Kesos	V	V
7	TRI WIDYASTUTI, S.Sos.	Kasi Yanum	V	V
8	TIA SEPTIYANI, A.Md.	Kasubag Perenc Keu	V	V

3. Daftar Pejabat Struktural SKPD yang Belum Terisi :

NO	NAMA	Jabatan Struktural	Eselon
1		Kasubag Umpeg	IV

4. Daftar Pejabat Fungsional Umum :

NO	NAMA	NIP	Nama Jabatan Fungsional
1	SUNARDI	197401042008011004	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	SRIYATNO	197001082009061001	Pengelola Administrasi Pemerintahan

3	MURTOYO	198611032012121002	Penata Laporan Keuangan
---	---------	--------------------	-------------------------

5. Daftar Pejabat Fungsional Tertentu :

NO	NAMA	NIP	Nama Jabatan Fungsional Tertentu
			NIHIL

6. Daftar Pejabat Fungsional Umum yang belum terisi :

NO	Nama Jabatan Fungsional Umum	Jumlah
1	Pengelola Administrasi Pemerintahan	1
2	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat Desa	1
3	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	2
4	Pengelola Ketertiban	2
5	Pengelola Kesejahteraan Sosial	2
6	Pengelola Data Pelayanan	2
7	Pengelola Kepegawaian	1
8	Pramu Kebersihan	1
9	Petugas Keamanan	2
10	Pengelola Sarana dan Prasarana	1
11	Bendahara	1
12	Verifikator Keuangan	1
	Jumlah	17 formasi

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nihil

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PILIHAN

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

Nihil

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 755.000,00 Realisasi: Rp. 745.000,00 Persentase: (98,68%)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 laporan	2 (100.00%)		
			b. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Fasilitasi Kunjungan Tamu Anggaran: Rp. 750.000,00 Realisasi: Rp. 750.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 12 laporan	12 (100.00%)		
			c. PROGRAM	1) Koordinasi dan Penyusunan DPA-	Jumlah	2		

			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD Anggaran: Rp. 840.000,00 Realisasi: Rp. 825.000,00 Persentase: (98,21%)	Dokumen DPA- SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 dokumen	(100.00%)		
				2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran: Rp. 1.430.000,00 Realisasi: Rp. 1.370.000,00 Persentase: (95,80%)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 dokumen	2 (100.00%)		
			d. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Pemeliharaan	1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 4.500.000,00 Realisasi: Rp. 4.499.000,00 Persentase: (99,98%)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 bulan	12 (100.00%)		

			Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 64.406.860,00 Realisasi: Rp. 64.119.500,00 Persentase: (99,55%)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi 12 bulan	12 (100.00%)		
			e. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Anggaran: Rp. 5.946.250,00 Realisasi: Rp. 5.911.250,00 Persentase: (99,41%)	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD 12 dokumen	12 (100.00%)		
			f. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Pengadaan	1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Anggaran: Rp. 47.500.000,00 Realisasi: Rp. 45.320.122,00 Persentase: (95,41%)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 unit	2 (100.00%)		

			Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
				2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 57.037.500,00 Realisasi: Rp. 56.750.000,00 Persentase: (99,50%)	jumlah peralatan mesin lainya yang tersedia 2 unit	2 (100.00%)		
				3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 30.000.000,00 Realisasi: Rp. 29.878.000,00 Persentase: (99,59%)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit	1 (100.00%)		
			g. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Anggaran: Rp. 1.450.000,00 Realisasi: Rp. 1.450.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 dokumen	12 (100.00%)		
				2) Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket	12		

				Kantor Anggaran: Rp. 32.591.000,00 Realisasi: Rp. 32.591.000,00 Persentase: (100,00%)	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 paket	(100.00%)		
				3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Anggaran: Rp. 14.808.600,00 Realisasi: Rp. 14.808.600,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 12 paket	12 (100.00%)		
			h. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 1.695.277.630,00 Realisasi: Rp. 1.535.187.338,00 Persentase: (90,56%)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 o/b	12 (100.00%)		
			i. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Penyediaan	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran: Rp. 30.000.000,00 Realisasi: Rp. 28.178.331,00 Persentase: (93,93%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan	12 (100.00%)		

			Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran: Rp. 303.600.000,00 Realisasi: Rp. 301.680.000,00 Persentase: (99,37%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan	12 (100.00%)		
		j.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran: Rp. 60.014.000,00 Realisasi: Rp. 58.248.080,00 Persentase: (97,06%)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 bulan	12 (100.00%)		
		k.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran: Rp. 1.875.000,00 Realisasi: Rp. 1.875.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 laporan	12 (100.00%)		

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran: Rp. 20.443.500,00 Realisasi: Rp. 20.443.500,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 paket	12 (100.00%)		
				2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran: Rp. 46.074.680,00 Realisasi: Rp. 46.070.730,00 Persentase: (99,99%)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 paket	12 (100.00%)		
				3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran: Rp. 137.238.000,00 Realisasi: Rp. 133.691.000,00 Persentase: (97,42%)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan	12 (100.00%)		
			m PROGRAM . PENUNJANG	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	4 (100.00%)	nihil	nihil

			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UPATEN/KOTA, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Anggaran: Rp. 6.760.200,00 Realisasi: Rp. 6.714.700,00 Persentase: (99,33%)	Perencanaan Perangkat Daerah 4 dokumen			
--	--	--	---	---	--	--	--	--

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Nihil

E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

H. UNSUR KEWILAYAHAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	KECAMATAN		a. PROGRAM	1) Fasilitasi Administrasi Tata	Jumlah	9		

			PEMBINAAN DAN PENGA WASAN PEM ERINTAHAN DESA, Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa Anggaran: Rp. 4.860.000,00 Realisasi: Rp. 4.850.000,00 Persentase: (99,79%)	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9 dokumen	(100.00%)		
				2) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Anggaran: Rp. 3.615.000,00 Realisasi: Rp. 3.610.000,00 Persentase: (99,86%)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 9 dokumen	9 (100.00%)		
				3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Anggaran: Rp. 3.615.000,00 Realisasi: Rp. 3.585.000,00 Persentase: (99,17%)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9 dokumen	9 (100.00%)		
				4) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam	9 (100.00%)		

				Anggaran: Rp. 3.965.000,00 Realisasi: Rp. 3.960.000,00 Persentase: (99,87%)	rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 9 dokumen			
			b. PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEME RINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, Kegiatan Peny elenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1) Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 4.833.450,00 Realisasi: Rp. 4.823.450,00 Persentase: (99,79%)	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 laporan	2 (100.00%)		
			c. PROGRAM P ENYELENGG ARAAN URUSAN PEM ERINTAHAN UMUM, Kegiatan Peny elenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan	1) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Anggaran: Rp. 4.440.000,00 Realisasi: Rp. 4.265.000,00 Persentase: (96,06%)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan	100 (100.00%)		

			Kepala Daerah		Lokal, Regional, dan Nasional 100 orang			
				2) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Anggaran: Rp. 81.789.865,00 Realisasi: Rp. 77.269.783,00 Persentase: (94,47%)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 300 orang	300 (100.00%)		
			d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 29.744.800,00 Realisasi: Rp. 29.744.800,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 laporan	2 (100.00%)		
			e. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 2.500.000,00 Realisasi: Rp. 2.500.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan 2 laporan	2 (100.00%)		

			Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					
			f. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Anggaran: Rp. 10.190.500,00 Realisasi: Rp. 10.170.500,00 Persentase: (99,80%)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 lembaga	1 (100.00%)		
			g. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Anggaran: Rp. 17.007.800,00 Realisasi: Rp. 16.997.200,00 Persentase: (99,94%)	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1 laporan	1 (100.00%)		
			h. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi	1) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Anggaran: Rp. 1.170.000,00 Realisasi: Rp. 1.150.000,00 Persentase: (98,29%)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3 dokumen	3 (100.00%)		

			dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
			i. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM, Kegiatan Koordinasi Upaya Penyel enggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 39.000.000,00 Realisasi: Rp. 38.960.000,00 Persentase: (99,90%)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 laporan	12 (100.00%)		

I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Nihil

J. UNSUR KEKHUSUSAN

Nihil

BAB V

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

A. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT YANG DILAKSANAKAN

PEMERINTAH KABUPATEN

N o	Kement erian/ LPNK	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

B. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI YANG DILAKSANAKAN

PEMERINTAH KABUPATEN

N o	Bidang Urusan	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA

N o	Kabupa ten	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

BAB VI

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR LAYANAN MINIMAL

1. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM

No	Jenis	Indikator Kinerja Penerima			Mutu Minimal			Keterangan
		Indikator	Target	Batas	Indikator	Target	Batas	

3. Indeks Pencapaian (IP) SPM

BAB VII

INOVASI DAN PENGHARGAAN

A. INOVASI

No.	Nama Inovasi	Deskripsi
-----	--------------	-----------

B. PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
-----	------------------	------------------------------

BAB VIII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum Camat Jatiyoso dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2023 sesuai tupoksinya dengan baik, seperti indikatornya antara lain :

- a. Telah berjalannya penyelenggaraan pemerintahan s/d tingkat desa cukup efektif dan efisien;
- b. Telah dilakukannya tugas-tugas koordinatif dalam bidang pembangunan wilayah;
- c. Telah dilaksanakannya tugas-tugas pembinaan kemasyarakatan bersama instansi terkait;
- d. Telah diselenggarakannya tugas-tugas umum pemerintahan dengan cukup baik.

B. SARAN

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Masyarakat, sangat diperlukan peningkatan kualitas SDM secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga sangat dibutuhkan demi kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat yang berbasis IT. Sehingga tingkat pemahaman serta pengetahuan perangkat kecamatan dapat mengikuti perkembangan baik dari segi peraturan yang harus diterapkan dan ketertiban administrasi birokrasi serta standar mutu pelayanan masyarakat.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2024 ini kami sampaikan untuk menjadikan pemeriksaan.

Jatiyoso, Januari 2025



CAMAT JATIYOSO

HARYANTO, S.E., M.A.P.

Pembina

NIP. 19670514 198903 1 011